

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peningkatan mutu pendidikan merupakan salah satu agenda strategis pembangunan nasional yang terus diupayakan oleh pemerintah. Mutu pendidikan merupakan aspek terpenting dan merupakan kunci dalam mewujudkan masa depan pendidikan yang lebih baik.^{1,2} Pendidikan tidak hanya dipandang sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai instrumen utama dalam membentuk sumber daya manusia yang beriman, berilmu, berakhlak, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.³

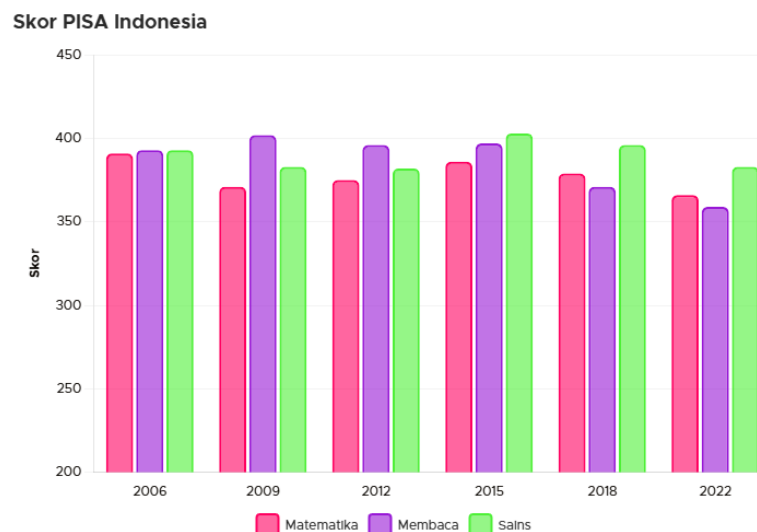
Namun demikian, hasil *Programme for International Student Assessment* (PISA) menunjukkan bahwa capaian literasi dan numerasi peserta didik Indonesia masih berada di bawah rata-rata negara OECD (*Organization for Economic Co-operation and Development*). Hasil PISA 2022 menunjukkan dari 81 negara peserta, Indonesia memperoleh capaian kemampuan membaca dengan skor rata-rata 359, 117 poin dibawah skor rata-rata OECD yaitu 476. Selanjutnya, untuk kemampuan matematika, Indonesia meraih rata-rata 366, sedangkan rata rata OECD 472. Dan terakhir pada kemampuan sains Indonesia memperoleh nilai rata rata 383, terpaut 102 poin dari rata-rata OECD yaitu 485.⁴ Gambaran capaian skor PISA Indonesia ditunjukkan oleh grafik pada gambar 1.1.

¹ Niken Ristianah and Toha Ma'sum, "Konsep Manajemen Mutu Pendidikan," *Tabyin: Jurnal Pendidikan Islam* 4, no. 1 (2022).

² Nana Noviada Kwartawaty, Glenda Angeli, and Anna Erlina, "Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan Nasional Melalui Pendekatan Total Quality Management (TQM)," *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 8, no. 12 (2025): 13261–67.

³ Nurshafitri, Yesha Arista Sulistiawati, and Herlini Puspika sari, "Rekonstruksionisme Dalam Pendidikan Islam Yang Responsif Terhadap Tantangan Zaman," *Al Abshor: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2, no. 4 (2025): 394–405.

⁴ Afra Hanifah Prasastisiwi, "Posisi Indonesia Di PISA 2022, Siapkah Untuk 2025?" (Goodstats, 2024).



Gambar 1. 1 Hasil Skor PISA Indonesia

Sumber : GoodStats (2024)

Grafik tersebut menunjukkan bahwa hasil PISA Indonesia masih dibawah nilai 400 untuk ketiga aspek. Jika membandingkan hasil pencapaian nilai PISA dari tahun 2015, nilai PISA untuk ketiga kategori memiliki penurunan baik di tahun 2018 maupun di tahun 2022.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kualitas pembelajaran, khususnya yang berorientasi pada penguatan kemampuan berpikir tingkat tinggi, masih perlu ditingkatkan secara sistematis. Oleh karena itu, pemerintah secara berkelanjutan melakukan berbagai reformasi kebijakan pendidikan antara lain perubahan kurikulum, peningkatan kompetensi guru, revitalisasi sekolah, membangun sekolah unggul dan digitalisasi pembelajaran guna menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu, merata, dan berkeadilan.^{5,6}

⁵ “Pemerintah Dorong Pendidikan Merata Dan Berkualitas Melalui Revitalisasi Sekolah Dan Sekolah Unggul Garuda” (Kemenko PMK, 2024), <https://www.kemendiknas.go.id/pemerintah-dorong-pendidikan-merata-dan-berkualitas-melalui-revitalisasi-sekolah-dan-sekolah-unggul>.

⁶ Afriantoni et al., “Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Di Sekolah Dasar,” *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia* 3, no. 4 (2025): 309–17, <https://jpion.org/index.php/jpi>.

Salah satu aspek penting dalam upaya peningkatan mutu pendidikan adalah sistem evaluasi.⁷ Evaluasi berfungsi sebagai alat untuk mengetahui sejauh mana perubahan yang dilakukan, melihat tujuan pendidikan telah tercapai serta sebagai dasar pengambilan keputusan dalam perbaikan kebijakan dan praktik pengajaran.^{8,9} Dalam perspektif manajemen pendidikan, evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian mutu pendidikan secara berkelanjutan. Melalui evaluasi yang tepat, satuan pendidikan dapat memperoleh gambaran objektif mengenai kekuatan, kelemahan, serta kebutuhan perbaikan yang perlu dilakukan.^{10,11,12}

Evaluasi juga sejalan dengan pedoman ajaran Islam. Dalam Al Qur'an Surah Al Hasyr ayat 18, Allah berfirman :

لَا يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْتَظِرْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Ayat tersebut mengandung prinsip muhasabah, yaitu kesediaan menilai tindakan yang telah dilakukan sebelumnya sebagai dasar mempersiapkan tindakan yang lebih baik pada masa mendatang. Dalam manajemen pendidikan, prinsip tersebut relevan dengan evaluasi kebijakan yang tidak berhenti pada pengukuran keberhasilan, tetapi diarahkan pada refleksi, akuntabilitas, dan perbaikan mutu secara berkelanjutan.

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah Indonesia melakukan reformasi sistem penilaian nasional dengan menggantikan Ujian Nasional (UN) menjadi Asesmen Nasional (AN). Kebijakan ini mulai diterapkan sejak tahun 2021

⁷ Effrosyni Taraza, Sofia Anastasiadou, and Christos Papademetriou, “Evaluation of Quality and Equality in Education Using the European Foundation for Quality Management Excellence Model — A Literature Review,” 2024.

⁸ Fajri Ismail, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, Pertama (Palembang: Karya Sukses Mandiri, 2016).

⁹ Ahmad Rusdiana, *Pengawasan Dan Evaluasi Pendidikan*, Pertama (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023).

¹⁰ Daniel L Stufflebeam, “Institutionalizing Evaluation in Schools L,” 2003, 775–76.

¹¹ Xiaopeng Wu, Tianshu Xu, and Jincheng Zhou, “Sustainability of Evaluation: The Origin and Development of Value-Added Evaluation from the Global Perspective,” 2022, 1–13.

¹² Guanghui Min et al., “Research on the Evaluation Model of School Management Quality in the Compulsory Education Stage Based on Big Data Technology,” 2023.

sebagai bagian dari transformasi pendidikan nasional.¹³ Asesmen Nasional dirancang bukan untuk menilai capaian individu peserta didik, melainkan untuk memetakan mutu pendidikan pada tingkat satuan pendidikan dan sistem secara keseluruhan. Asesmen Nasional terdiri atas tiga instrumen utama, yaitu Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) yang mengukur literasi dan numerasi, Survei Karakter, serta Survei Lingkungan Belajar.¹⁴

Pada pasal 2 dan 3, Permendikbudristek Nomor 17 Tahun 2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9 Tahun 2026 dinyatakan bahwa AN bertujuan untuk mengukur tiga aspek utama, yaitu hasil belajar kognitif, hasil belajar nonkognitif, dan kualitas lingkungan belajar pada satuan pendidikan. Hasil belajar kognitif mencakup kemampuan literasi membaca dan numerasi yang diukur melalui Asesmen Kompetensi Minimum. Sementara itu, hasil belajar nonkognitif mencakup sikap yang melandasi karakter dalam delapan dimensi profil lulusan dan diukur melalui survei karakter. Sedangkan yang terakhir adalah, kualitas lingkungan belajar yang diukur melalui survei lingkungan belajar mencakup iklim keamanan, iklim inklusivitas dan kebinekaan, serta proses pembelajaran di satuan pendidikan.¹⁵

Dalam implementasinya, Asesmen Nasional dilaksanakan berbasis komputer yang dikenal dengan istilah Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK). Melalui ANBK, pemerintah menyediakan Rapor Pendidikan yang berisi hasil pemetaan mutu pendidikan sebagai dasar perencanaan berbasis data. Rapor Pendidikan diharapkan menjadi instrumen strategis bagi satuan pendidikan dalam melakukan refleksi, perencanaan program, serta peningkatan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan.¹⁶

¹³ Yulia Indahri, "Asesmen Nasional Sebagai Pilihan Evaluasi Sistem Pendidikan Nasional," *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 12, no. 2 (2021): 195–215, <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v12i2.2364>.

¹⁴ "Asesmen Nasional Berbasis Komputer" (Jakarta, 2021), <https://anbk.kemdikbud.go.id/>.

¹⁵ Permendikdasmen, "Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Asesmen Nasional" (Jakarta, 2026).

¹⁶ Kemendikdasmen, "Rapor Pendidikan," n.d., <https://pusatinformasi.rumahpendidikan.kemendikdasmen.go.id/hc/id/categories/52399027095193-Rapor-Pendidikan>.

Namun demikian, sangat penting untuk mengetahui apakah kebijakan ANBK ini sudah berjalan efektif atau hanya berjalan sekadar hanya formalitas dan tidak memberikan dampak apapun bagi satuan pendidikan khususnya dan peningkatan mutu pendidikan nasional pada umumnya. Efektivitas suatu kebijakan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan kebijakan itu sendiri, melainkan sangat dipengaruhi oleh proses implementasinya di tingkat satuan pendidikan. Perlu adanya evaluasi kebijakan pendidikan untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut efektif, efisien, adil, *responsive* dan tepat artinya kebijakan tersebut dilaksanakan sesuai tujuan, didukung oleh sumber daya yang memadai, serta memberikan implikasi nyata terhadap peningkatan kualitas pengajaran.¹⁷ Tanpa evaluasi yang komprehensif, kebijakan berpotensi hanya bersifat administratif dan belum memberikan dampak substantif terhadap mutu pendidikan.

Dalam konteks madrasah, pelaksanaan ANBK memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri. Madrasah sebagai lembaga pendidikan berciri khas Islam berada di bawah naungan Kementerian Agama, dengan kondisi sumber daya, budaya organisasi, serta karakteristik peserta didik yang berbeda dengan sekolah umum. Dalam pelaksanaannya, beberapa madrasah menghadapi tantangan dan kendala antara lain, sarana dan prasarana madrasah yang belum memadai, keterbatasan literasi digital pada guru dan siswa, juga pemahaman terhadap instrument ANBK yang masih rendah. Selain itu, kendala teknis seperti jaringan internet yang lemah, serta kesiapan sumber daya manusia dalam mengelola dan memanfaatkan hasil asesmen juga menjadi hambatan tersendiri.^{18,19} Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan nasional seperti ANBK memerlukan kesiapan manajerial, pemahaman kebijakan, serta strategi tindak

¹⁷ William Dunn, *Analisis Kebijakan Publik (Terjemahan)* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press., 2003).

¹⁸ Abdul Fitri Berlianto and Hedy Ramadhan Putra Pembangunan, "Evaluasi Pelaksanaan Asesmen Nasional Berstandar Komputer Di Madrasah Ibtidaiyah," *Ideguru: Jurnal Karya Ilmiah Guru* 8, no. 3 (2023): 739–45, <https://doi.org/10.51169/ideguru.v8i3.623>.

¹⁹ Sartini et al., "Pendapatan Guru Terhadap Asesmen Nasional Berbasis Komputer Sebagai Sarana Evaluasi Sistem Pendidikan Di Mi Muhammadiyah Karanganyar," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10 (2024): 612–23, <https://doi.org/DOI:https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11419>.

lanjut yang kontekstual agar hasil asesmen benar-benar dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pengajaran.

Tabel 1.1. menunjukkan nilai capaian ANBK yang diperoleh Madrasah Tsanawiyah selama kurun waktu tiga tahun dari tahun 2022-2024. Untuk nilai literasi dan numerasi memperlihatkan peningkatan hasil, hanya saja untuk aspek karakter dan kualitas pembelajaran masih turun naik tetapi cenderung stagnan.

Tabel 1. 1 Rapor Pendidikan MTs Hasil ANBK

Indikator	Nilai Capaian(%)		
	2023	2024	2025
Kemampuan Literasi	54,45% (Sedang)	58,36% (Sedang)	61,29% (Sedang)
Kemampuan Numerasi	35,83% (Sedang)	52,49% (Sedang)	59,67% (Sedang)
Karakter Murid	51,66% (Baik)	50,65% (Sedang)	51% (Sedang)
Kualitas Pembelajaran	58,50% (Sedang)	58,60% (Sedang)	57,22% (Sedang)

Sumber : Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Rapor Pendidikan Indonesia 2025

Capaian dan Agenda Perbaikan, data SMP/MTs/ sederajat 2022–2024, diolah oleh peneliti.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 26 Agustus 2025 di dua madrasah, yaitu Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Bandung dan Madrasah Tsanawiyah Swasta Al-Inayah Kota Bandung, diperoleh gambaran awal mengenai pelaksanaan kebijakan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) di lingkungan madrasah.

Hasil wawancara awal dengan Wakil Kepala Madrasah bidang Kurikulum di MTs Negeri 1 Bandung menunjukkan bahwa pelaksanaan ANBK telah dilaksanakan secara konsisten sejak tahun 2021, seiring dengan diberlakukannya kebijakan Asesmen Nasional oleh pemerintah. Dari sisi kesiapan sarana dan prasarana, madrasah tidak mengalami kendala yang berarti dalam pelaksanaan ANBK karena dukungan fasilitas yang relatif memadai.

Dalam hal pemanfaatan hasil ANBK, pihak madrasah telah melakukan analisis terhadap Rapor Pendidikan sebagai dasar perencanaan tindak lanjut. Kepala madrasah berperan langsung dalam membaca dan menganalisis hasil asesmen, kemudian menyosialisasikannya kepada guru melalui forum internal madrasah. Hasil analisis tersebut dijadikan sebagai rekomendasi dalam

penyusunan program kegiatan pembelajaran maupun kegiatan kokurikuler yang mendukung peningkatan kompetensi peserta didik.

Sementara itu, berdasarkan hasil studi pendahuluan di MTs Swasta Al-Inayah, diperoleh informasi dari hasil wawancara dengan Kepala dan Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum bahwa ANBK juga telah dilaksanakan secara rutin sejak tahun 2021. Madrasah secara bertahap melakukan perbaikan sarana dan prasarana pendukung, termasuk penyediaan ruang laboratorium komputer dan perangkat yang memadai. Hasil ANBK menunjukkan adanya peningkatan capaian literasi dan numerasi peserta didik dari tahun ke tahun.

Namun demikian, hasil wawancara awal menunjukkan bahwa pada tahap awal implementasi, kepala madrasah dan guru mengalami kesulitan dalam memahami hasil ANBK yang tertuang dalam Rapor Pendidikan. Pemanfaatan hasil asesmen dalam perbaikan pembelajaran belum berjalan secara optimal. Sebagian guru masih memandang ANBK sebagai kegiatan administratif, sehingga tindak lanjut pembelajaran berbasis data belum terlaksana secara sistematis. Selain itu, pemahaman guru terhadap indikator literasi dan numerasi masih terbatas.

Temuan awal pada kedua lokus tersebut mengindikasikan bahwa meskipun kebijakan ANBK dilaksanakan dengan pedoman yang sama secara nasional, implementasinya di tingkat madrasah menunjukkan karakteristik yang berbeda. Perbedaan tersebut terutama tampak pada aspek pemanfaatan hasil asesmen dan pola tindak lanjut pembelajaran. Kondisi ini menunjukkan pentingnya dilakukan evaluasi kebijakan ANBK secara komprehensif untuk memahami konteks, kesiapan, proses pelaksanaan, serta hasil dan implikasinya terhadap kualitas pembelajaran di madrasah, baik pada madrasah negeri maupun madrasah swasta.

Kemudian dari hasil analisis terhadap beberapa penelitian sebelumnya, diketahui pada umumnya penelitian menyoroti pelaksanaan teknis ANBK,

kesiapan infrastruktur, serta hambatan operasional di sekolah.^{20,21,22} Namun, kajian yang secara khusus mengevaluasi kebijakan ANBK secara komprehensif serta mengaitkannya dengan implikasi terhadap kualitas pengajaran di madrasah masih relatif terbatas.²³ Padahal, sebagai kebijakan nasional, ANBK seharusnya tidak hanya dinilai dari kelancaran pelaksanaannya, tetapi juga dari sejauh mana hasilnya dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan model CIPP secara komprehensif dalam studi multisitus di madrasah serta pengintegrasian hasil evaluasi ANBK dengan analisis kualitas pengajaran.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengevaluasi kebijakan Asesmen Nasional Berbasis Komputer menggunakan model CIPP (Context, Input, Process, Product) serta mengkaji implikasinya terhadap peningkatan kualitas pengajaran di dua madrasah yaitu Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 dan Madrasah Tsanawiyah Al-Inayah. Melalui evaluasi yang komprehensif, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran utuh mengenai pelaksanaan kebijakan ANBK sekaligus memberikan rekomendasi strategis bagi pengelolaan pembelajaran berbasis data di lingkungan madrasah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian serta hasil studi pendahuluan pada dua madrasah, yaitu Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Bandung dan Madrasah Tsanawiyah Swasta Al-Inayah Kota Bandung, maka rumusan masalah

²⁰ Jelly M Lembong et al., “Hambatan Pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) Di SMP Negeri 2 Tombatu,” *Jurnal Sinestesia*, vol. 13, 2023, <https://sinestesia.pustaka.my.id/journal/article/view/517>.

²¹ Nurhayati Ambo and Fitri Nur Mahmudah, “Implementasi Pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer,” *Journal of Educational Administration and Leadership* 4, no. 2 (2023): 46–52, <https://doi.org/10.24036/jeal.v4i2.465>.

²² Erwin Simon Paulus Olak Wuwur, “Analisis Kesiapan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) Di Sekolah Dasar Daerah 3T,” *Simpati* 1, no. 1 (2023): 01–08, <https://doi.org/10.59024/simpati.v1i1.58>.

²³ Muhammad Yahyadin et al., “Pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) Di SD Negeri Batu Tunau,” *J-INSTECH: Journal of Instructional Technology* 06, no. 1 (2025): 43–50, <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.20527/j-instech.v6i1.15152>.

dalam penelitian ini dapat tergambar dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana evaluasi kebijakan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) ditinjau dari aspek konteks di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Bandung dan Madrasah Tsanawiyah Al Inayah Kota Bandung?
2. Bagaimana evaluasi kebijakan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) ditinjau dari aspek input di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Bandung dan Madrasah Tsanawiyah Al Inayah Kota Bandung?
3. Bagaimana evaluasi kebijakan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) ditinjau dari aspek proses di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Bandung dan Madrasah Tsanawiyah Al Inayah Kota Bandung?
4. Bagaimana evaluasi kebijakan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) ditinjau dari aspek produk di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Bandung dan Madrasah Tsanawiyah Al Inayah Kota Bandung?
5. Bagaimana pemanfaatan hasil Asesmen Nasional berimplikasi terhadap kualitas pengajaran di MTs Negeri 1 Kota Bandung dan MTs Al-Inayah Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Bandung dan Madrasah Tsanawiyah Al Inayah Kota Bandung ditinjau dari aspek konteks.
2. Menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Bandung dan Madrasah Tsanawiyah Al Inayah Kota Bandung ditinjau dari aspek input.
3. Menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Bandung dan Madrasah Tsanawiyah Al Inayah Kota Bandung ditinjau dari aspek proses.

4. Menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Bandung dan Madrasah Tsanawiyah Al Inayah Kota Bandung ditinjau dari aspek hasil.
5. Menganalisis implikasi pemanfaatan hasil Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) terhadap kualitas pengajaran di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Bandung dan Madrasah Tsanawiyah Al Inayah Kota Bandung.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian manajemen pendidikan Islam, khususnya yang berkaitan dengan evaluasi kebijakan pendidikan dan peningkatan kualitas pengajaran di madrasah. Penelitian ini memperkaya kajian evaluasi kebijakan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) melalui penggunaan model CIPP pada konteks madrasah negeri dan madrasah swasta. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman konseptual mengenai variasi implementasi kebijakan pendidikan nasional pada satuan pendidikan dengan karakteristik kelembagaan yang berbeda.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Madrasah Negeri dan Madrasah Swasta

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif mengenai pelaksanaan kebijakan ANBK pada madrasah negeri dan madrasah swasta, terutama dalam aspek konteks, kesiapan sumber daya, proses implementasi, serta pemanfaatan hasil asesmen. Temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan refleksi dan evaluasi internal dalam rangka meningkatkan kualitas pengajaran berbasis data.

b. Bagi Kepala Madrasah dan Pengelola Pendidikan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan manajerial, khususnya dalam mengoptimalkan pemanfaatan Rapor Pendidikan sebagai dasar penyusunan program

peningkatan mutu pembelajaran, baik pada madrasah negeri maupun madrasah swasta.

c. Bagi Guru

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman guru terhadap fungsi ANBK sebagai instrumen evaluasi mutu pembelajaran. Melalui pemanfaatan hasil asesmen, guru diharapkan mampu mengembangkan strategi pembelajaran yang lebih adaptif terhadap kebutuhan peserta didik, khususnya dalam penguatan literasi dan numerasi.

d. Bagi Kementerian Agama dan Pemangku Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan empiris bagi Kementerian Agama dan pemangku kebijakan pendidikan dalam merumuskan strategi pendampingan, pembinaan, dan penguatan implementasi ANBK di madrasah negeri dan swasta sesuai dengan karakteristik masing-masing satuan pendidikan.

e. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang berminat mengkaji evaluasi kebijakan pendidikan, implementasi asesmen nasional, serta peningkatan kualitas pengajaran di madrasah dengan pendekatan multisitus.

D. Kerangka Pemikiran

Melalui Permendikbudristek Nomor 17 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9 Tahun 2026, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menetapkan Asesmen Nasional sebagai instrumen evaluasi mutu pendidikan untuk memetakan capaian literasi, numerasi, karakter, dan lingkungan belajar pada satuan pendidikan. Kebijakan ini diwujudkan dalam pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK). Untuk konteks madrasah, pelaksanaannya melibatkan satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama dan didukung oleh pedoman atau kebijakan teknis yang relevan.

Secara konseptual, ANBK tidak hanya dimaksudkan sebagai alat ukur pencapaian kompetensi siswa, tetapi sebagai instrumen kebijakan yang menyediakan data mutu pendidikan melalui Rapor Pendidikan. Data tersebut diharapkan menjadi dasar pengambilan keputusan dan perencanaan berbasis data dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan, termasuk madrasah.²⁴

Namun demikian, efektivitas kebijakan ANBK sangat ditentukan oleh bagaimana kebijakan tersebut dipahami, dilaksanakan, dan dimanfaatkan di tingkat satuan pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan suatu model evaluasi yang mampu menilai kebijakan secara menyeluruh, mulai dari latar belakang kebijakan, kesiapan sumber daya, proses implementasi, hingga hasil dan implikasinya terhadap kualitas pembelajaran.

Penelitian ini menggunakan model evaluasi CIPP yang dikembangkan oleh Stufflebeam. Model ini dikembangkan untuk membantu pengambil keputusan dalam meningkatkan kualitas program melalui evaluasi yang bertujuan untuk perbaikan berkelanjutan. Menurut Stufflebeam dan Zhang, evaluasi tidak semata-mata digunakan untuk membuktikan keberhasilan program, tetapi untuk memperbaiki pelaksanaan kebijakan melalui analisis konteks, kesiapan sumber daya, proses implementasi, dan hasil yang dicapai. Model ini dipandang komprehensif karena mencakup seluruh tahapan kebijakan serta memungkinkan penggunaan berbagai metode dan sumber data dalam proses evaluasi.²⁵

Model CIPP ini terdiri atas empat komponen utama. Empat komponen tersebut antara lain: pertama adalah evaluasi konteks berfungsi untuk mengidentifikasi kebutuhan, permasalahan, dan peluang yang menjadi dasar dalam penetapan tujuan, prioritas, serta penilaian terhadap pentingnya hasil program. Kedua adalah evaluasi input digunakan untuk menelaah berbagai alternatif strategi dalam memenuhi kebutuhan guna mendukung perencanaan

²⁴ “Permendikbudristek No.17 Tahun 2021 Tentang Asesmen Nasional,” 2021.

²⁵ Daniel L Stufflebeam and Guili Zhang, “The CIPP Evaluation Model: How to Evaluate for Improvement and Accountability,” 2017.

program dan penggunaan sumber daya secara tepat. Selanjutnya yang ketiga adalah evaluasi proses, difokuskan pada pelaksanaan rencana agar kegiatan berjalan sesuai arah sekaligus membantu menjelaskan hasil yang diperoleh. Yang terakhir adalah evaluasi produk atau hasil, bertujuan mengidentifikasi hasil yang diharapkan maupun yang tidak direncanakan untuk menilai efektivitas program dan memastikan proses tetap berjalan sesuai tujuan. Keempat komponen evaluasi tersebut saling berkaitan dan dapat dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan, pelaksana program, maupun penyedia layanan untuk mengembangkan, memperbaiki, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan program serta menyebarluaskan praktik yang efektif demi peningkatan kualitas layanan.²⁶ Model CIPP dipandang relevan karena menempatkan evaluasi sebagai alat pengambilan keputusan (*decision-oriented evaluation*) dan mengukur efektivitas kebijakan secara keseluruhan.²⁷

Dalam penelitian ini, model CIPP tidak hanya digunakan untuk mengelompokkan temuan penelitian ke dalam aspek konteks, input, proses, dan produk, tetapi juga digunakan sebagai dasar dalam memberikan pertimbangan evaluatif terhadap pelaksanaan kebijakan Asesmen Nasional Berbasis Komputer di madrasah. Oleh karena itu, kondisi empiris yang ditemukan pada masing-masing situs penelitian dibandingkan dengan kriteria evaluatif yang bersumber dari tujuan kebijakan Asesmen Nasional, peraturan dan pedoman pelaksanaan ANBK, konsep evaluasi CIPP, serta kebutuhan satuan pendidikan.

Pada aspek konteks, penilaian diarahkan pada relevansi tujuan ANBK dengan kebutuhan madrasah, pemahaman pemangku kepentingan, dan dukungan terhadap kebijakan. Pada aspek input, penilaian diarahkan pada kecukupan dan kesiapan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pelatihan, perencanaan, kesiapan peserta didik, serta pembiayaan. Pada aspek proses, penilaian dilakukan terhadap kesesuaian pelaksanaan dengan rencana dan pedoman, ketepatan jadwal, penanganan kendala, monitoring, serta evaluasi

²⁶ DL Stufflebeam, CF Madam, and T Kellaghan, "Evaluation Models" (Boston: Kluwer Academic Publishers, 2000).

²⁷ Stufflebeam and Zhang, "The CIPP Evaluation Model: How to Evaluate for Improvement and Accountability."

pelaksanaan. Adapun pada aspek produk, penilaian diarahkan pada ketersediaan dan pemahaman terhadap Rapor Pendidikan, pemanfaatan hasil ANBK, kebijakan madrasah berbasis data, serta keberlanjutan program tindak lanjut.

Perbandingan antara kondisi empiris dan kriteria evaluatif digunakan untuk menentukan tingkat keterpenuhan setiap indikator, yaitu terpenuhi, terpenuhi sebagian, belum terpenuhi, atau belum dapat dinilai karena keterbatasan data. Hasil penilaian tersebut selanjutnya digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, faktor pendukung, faktor penghambat, serta kebutuhan perbaikan dalam pelaksanaan ANBK di masing-masing madrasah.

Selain mengevaluasi kebijakan ANBK menggunakan model CIPP, penelitian ini juga akan melihat implikasi dari kebijakan ANBK terhadap peningkatan kualitas pengajaran di madrasah. Hasil ANBK yang tersaji dalam Rapor pendidikan akan menjadi bermakna jika madrasah dan guru mampu membaca, memahami, serta memanfaatkannya sebagai dasar perbaikan pembelajaran.

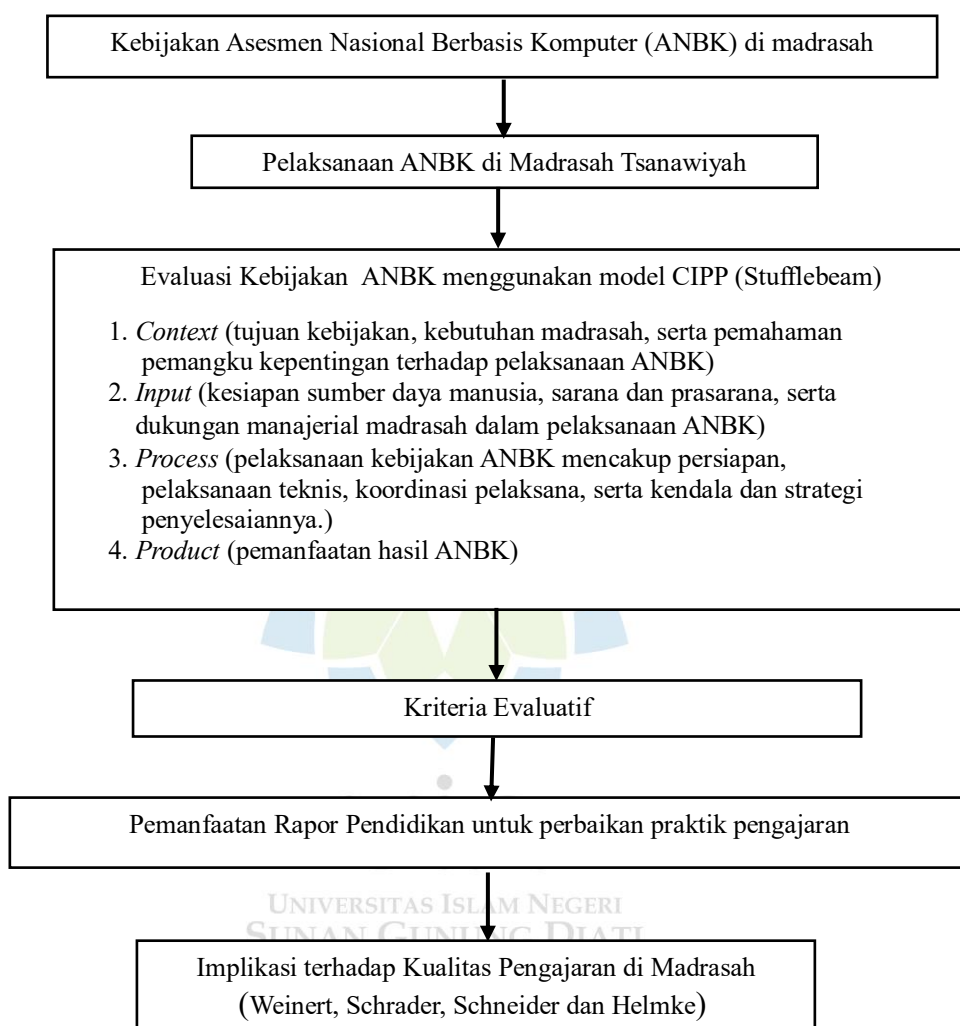
Untuk menganalisis implikasi hasil evaluasi ANBK terhadap peningkatan kualitas pembelajaran, penelitian ini menggunakan teori kualitas pengajaran yang dikemukakan oleh Weinert, Schrader, Schneider dan Helmke.^{28, 29} Menurut pandangan ini, pengajaran yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh metode mengajar tertentu, melainkan oleh kesesuaian antara tujuan pembelajaran, perilaku guru, konteks kelas, dan karakteristik siswa. Kualitas pengajaran yang baik ditandai oleh 6 hal yaitu: kejelasan penyampaian pembelajaran (*clarity*), struktur dan sistematika pembelajaran (*sctructuring*), pemberian petunjuk (*cueing*), manajemen kelas (*classroom management*), dukungan individual terhadap siswa (*individual support*), dan kesempatan belajar (*opportunity to learn*). Pengajaran yang demikian diyakini mampu menciptakan

²⁸ Franz E Weinert, Friedrich W Schrader, and Andreas Helmke, "Quality of Instruction and Achievement Outcomes.," in *The Relation between Education and Development* (Oxford: Pergamon Press, 1990), 895–914.

²⁹ Helmke Andreas, Wolfgang Schneider, and Franz E Weinert, "Quality Of Instruction And Classroom Learning Outcomes: The German Contribution To The Iea Classroom Environment Study," *Teaching and Teacher Education*, Pergamon Press Ltd 2, no. 1 (1986): 1–18.

proses pembelajaran yang optimal, yang selanjutnya berkontribusi terhadap peningkatan hasil belajar siswa.

Secara konseptual, kerangka pemikiran penelitian ini dapat terlihat pada gambar 1.2.



Gambar 1. 2 Kerangka Pemikiran Penelitian

Kerangka ini digunakan untuk memahami bagaimana kebijakan ANBK diimplementasikan pada Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Bandung dan MTs Al Inayah Kota Bandung serta bagaimana hasil evaluasi kebijakan tersebut berimplikasi terhadap peningkatan kualitas pengajaran. Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini akan berfokus pada 4 aspek yaitu mengenai bagaimana kebijakan ANBK dipahami dan dimaknai di madrasah tsanawiyah negeri dan swasta, seperti apa kesiapan dan proses implementasi dilakukan, kemudian

bagaimana hasil ANBK dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan pembelajaran dan implikasi evaluasi ANBK terhadap kualitas pengajaran berdasarkan dimensi teori Weinert, Schrader, Schneider dan Helmke.

